

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA, VIETNAM, DAN TIONGKOK

2.1 Signifikasi Dinamika Kawasan Asia Tenggara Bagi Dunia Internasional

Pada awal abad ke-21, Pertumbuhan pendapatan per kapita Asia Tenggara termasuk yang tercepat di dunia, dan kawasan ini menjadi penyumbang pertumbuhan global terbesar keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi luar negeri merupakan dua faktor yang secara signifikan mampu mendorong pertumbuhan serta perkembangan kawasan. Hal tersebut membuat standar hidup telah meningkat secara dramatis dan angka kemiskinan mengalami penurunan. (OECD, 2022)

Kawasan ini telah membuat langkah besar sejak berdirinya ASEAN sebagai organisasi regional selama lebih dari setengah abad yang lalu, beberapa fenomena yang menjadi tantangan kawasan seringkali hadir namun itu justru menjadi dinamika yang positif bagi perkembangan kawasan. Transformasi pesat yang terjadi di Asia Tenggara membuat jutaan orang telah pindah dari desa ke kota untuk tinggal dan bekerja. Negara-negara di kawasan ini mulai berfokus meningkatkan kapasitas pembangunan dengan memanfaatkan keunggulan strategis yang dimilikinya. Misalnya, Malaysia dan Thailand telah memantapkan diri sebagai kekuatan manufaktur global, memproduksi mobil, perangkat elektronik, dan chip komputer. Indonesia dan Filipina adalah salah satu pasar negara berkembang besar yang didorong oleh permintaan domestik yang tumbuh paling

cepat di dunia. Singapura adalah pusat keuangan dan komersial utama. Perekonomian perbatasan seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam keluar dari perencanaan pusat selama beberapa dekade setelah bergabung dengan ASEAN dan berintegrasi dengan rantai pasokan regional, salah satunya dengan Tiongkok. (CRISEA, 2020)

Manajemen ekonomi yang sehat juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Meskipun krisis yang terjadi di Asia pada tahun 1997 menyebabkan kemunduran bagi perekonomian, tetapi Asia Tenggara mampu bangkit kembali dengan progresif dan muncul lebih kuat. Bank-bank direstrukturisasi dan regulasi keuangan diperkuat. Pasar obligasi mata uang lokal diperdalam untuk mengurangi ketergantungan pada arus modal yang mudah berubah. Kenaikan harga dan pertumbuhan kredit dapat dikendalikan karena beberapa negara mulai mengadopsi target inflasi dan apa yang disebut kebijakan makroprudensial, yang dirancang untuk memantau dan mencegah risiko terhadap sistem keuangan.

Sejak negara-negara di Asia Tenggara mendeklarasikan kemerdekaan dan kedaulatannya dari praktek kolonialisme yang sudah terjadi selama berabad-abad, kawasan ini kemudian tumbuh dengan dinamika geopolitik yang kompleks dan saling mempengaruhi antara setiap aktornya. Berbagai dinamika yang terjadi disebabkan oleh gejolak dan transisi politik yang begitu terpolarisasi dimana setiap negara harus menghadapi serangkaian fenomena politik untuk membangun sistem dan struktur politik yang stabil.

Bangkitnya kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu bukti bahwa kawasan ini memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kawasan ini tidak lagi dilihat sebagai zona konflik dan krisis, seperti yang terjadi pada tahun 1940-an hingga 1970-an. Nilai strategis yang dimiliki kawasan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis. Asia Tenggara merupakan kawasan paling dinamis dan memiliki perkembangan paling cepat di dunia. Dengan PDB gabungan sebesar USD 2,767 triliun, kawasan ini mencakup pasar yang terdiri dari 650 juta orang dan menarik hampir seperlima arus masuk investasi asing langsung global setiap tahunnya. Selama beberapa tahun kedepan, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan menyentuh 5,2% setiap tahunnya. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kelas menengah yang berkembang, banyaknya jumlah usia produktif, meningkatnya kualitas pendidikan, ekonomi yang terdiversifikasi dan inisiatif integrasi regional yang intensif, termasuk rancangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 dan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 tentunya akan menunjang kemakmuran kawasan. (OECD, 2019)

Negara-negara Asia Tenggara kaya akan keanekaragaman hayati yang menjadi aset bagi dunia internasional, negara-negara ini bersama-sama menyumbang sekitar 80 persen keanekaragaman hayati global. Sekitar 65 persen spesies karang dunia terletak di 'segitiga karang' yang meliputi sebagian Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang merupakan salah satu kawasan laut paling produktif secara ekonomi di dunia. (Bank Dunia, 2021) Sekitar 45 persen wilayah ASEAN

ditutupi oleh hutan, yang menjadi habitat alami bagi sekitar 40 persen dari semua spesies hewan di bumi. (Aiqani, 2021)

Dari perspektif kawasan, peran Asia Tenggara dalam produksi, konsumsi, dan perdagangan mineral global saat ini memiliki nilai yang cukup signifikan, terutama dalam produk timah, nikel, tembaga, dan emas. Produksi mineral menyumbang 2% dari produk domestik bruto (PDB) kawasan. Kontribusi produksi mineral terhadap PDB tertinggi ada di Indonesia (2,3%), diikuti Laos (1,7%), dan Filipina (1,6%). Produksi mineral di Asia Tenggara didukung oleh beragam cadangan mineral baik logam maupun non logam. Kurangnya data cadangan yang konsisten di semua negara anggota ASEAN mempersulit untuk memberikan perkiraan yang pasti untuk kawasan ini secara keseluruhan. Indonesia menyumbang bagian yang signifikan dari cadangan mineral di Asia Tenggara dan dunia, termasuk 7,5% cadangan tembaga dunia yang diketahui, lebih dari 13% cadangan timah yang diketahui, lebih dari 5% cadangan nikel yang diketahui, dan lebih dari 4% cadangan emas yang diketahui dunia. Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam juga memiliki kekayaan mineral yang besar. (Humphreys, 2018)

Indonesia sejauh ini merupakan produsen terbesar sejumlah komoditas mineral logam, terutama sebagai hasil kekayaan mineral dan promosi investasi pemerintah di sektor pertambangan. Dari segi nilai, mineral utama yang diproduksi di negara-negara anggota ASEAN adalah nikel, tembaga, timah, dan emas, dengan Indonesia sebagai produsen utama logam tersebut. Untuk timah, nikel dan tembaga, produksi di Asia Tenggara mewakili bagian yang signifikan dari produksi dunia, masing-masing menyumbang 29%, 11% dan 8% dari produksi global. Mineral

logam lain yang diproduksi dalam skala lebih kecil di kawasan ini termasuk bauksit, timah, seng, dan bijih besi. Pada tahun 2018, total produksi mineral di Asia Tenggara bernilai sekitar US\$250 miliar atau sekitar 9% dari komoditas perdagangan ASEAN, dimana sekitar 21% dari perdagangan mineral adalah perdagangan internal ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN juga merupakan produsen penting dari beragam mineral non-logam, termasuk batu permata, gipsum, batu kapur, kaolin, batuan fosfat, pasir, kerikil, dan berbagai mineral industri lainnya. Produksi mineral non-logam penting bagi ekonomi Laos, Malaysia dan Myanmar, dan merupakan bagian yang signifikan dari total produksi mineral di Thailand dan Vietnam. Fasilitas pengolahan di Asia Tenggara terbatas dan sebagian besar produksi mineral logam diekspor sebagai bijih dan konsentrat untuk diproses/dimurnikan di luar kawasan. Namun, beberapa pengolahan mineral terjadi di wilayah tersebut, terutama tembaga, bauksit, timah, seng dan timah. Sebagai penghasil bijih mineral dan konsentrat terbesar, Indonesia juga merupakan penghasil utama produk mineral rafinasi. Beberapa logam olahan yang diproduksi secara lokal di negara anggota ASEAN dikonsumsi oleh industri manufaktur dan konstruksi dalam negeri, meskipun kawasan ini umumnya bergantung pada impor logam olahan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki posisi strategis bagi aktivitas transportasi dan perekonomian dunia. Kawasan ini membentang diantara dua jalur laut utama dunia, yaitu jalur timur-barat yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta jalur utara selatan yang

menghubungkan kawasan Asia Timur dengan benua Australia. Terdapat tiga pintu masuk yang dianggap sebagai titik utama di kawasan Asia Tenggara, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Diantara dua selat lainnya, Selat Malaka dianggap sebagai “Chokepoints” Asia karena memiliki letak yang strategis bagi perdagangan dunia dan juga bagi kepentingan negara-negara Asia Timur dan Selatan, seperti Jepang, Korea, Tiongkok, dan India. Selat itu menyumbang seperempat arus perdagangan dunia, terdapat sekitar 100 ribu kapal per tahun atau sekitar lebih dari 200 kapal setiap harinya melewati selat ini. Berdasarkan hal tersebut, dinamika kawasan Asia Tenggara tentunya akan selalu menjadi perhatian bagi dunia internasional. Rivalitas dua negara besar dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam memperebutkan pengaruh atas kendali Laut Cina Selatan adalah salah satu bukti bahwa Asia Tenggara memiliki prospek yang sangat potensial bagi kepentingan negara mereka. (Dibb, 2016)

Nilai strategis yang dimiliki kawasan Asia Tenggara telah mengundang keterlibatan OECD selama lebih dari dua dekade terakhir dalam pembangunan kawasan, organisasi itu menetapkan Asia Tenggara menjadi prioritas strategis melalui *Southeast Asia Regional Programme* (SEARP). Program tersebut dirancang untuk mendorong pertukaran pengalaman yang sistematis untuk mengembangkan solusi bersama dalam menghadapi tantangan kebijakan regional dan global. Forum SEARP berturut-turut membahas mengenai isu-isu yang berhubungan dengan MEA, seperti penerapan pajak, kebijakan investasi, konektivitas, peningkatan kualitas pendidikan serta beberapa isu yang berkaitan

dengan pembangunan kawasan. (OECD/ERIA, 2018) OECD juga mendapat manfaat dari konektivitas dengan Asia Tenggara.

Negara-negara ASEAN telah berkontribusi pada forum kebijakan OECD yang secara langsung telah meningkatkan relevansi dan dampak global OECD. Misalnya, Myanmar sebagai co-chair bersama Finlandia, berkontribusi pada pembaruan OECD Policy Framework on Investment pada 2015, yang mencerminkan fundamental ekonomi global baru, dengan aspek dari ekonomi rendah dan berkembang. Menurut OECD, dalam konteks global yang ditandai oleh ancaman proteksionis dan pertumbuhan yang lambat, peningkatan konektivitas baik di antara sesama negara anggota ASEAN, maupun dengan mitra eksternal, akan menjadi kunci bagi dinamika berkelanjutan kawasan ini. Peningkatan konektivitas akan mendukung integrasi regional di Asia Tenggara dan juga akan meningkatkan relevansi kawasan dalam dinamika ekonomi global.

2.2 Strategi Tiongkok Dalam Membangun Relasi Dan Menyebarakan Pengaruhnya Di Asia Tenggara

Dibandingkan kawasan Indo-Pasifik lainnya, Asia Tenggara telah muncul sebagai wilayah spesial bagi tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok bahkan jauh sebelum itu, hubungan antara kawasan ini dengan Tiongkok sudah terjalin beberapa abad sebelum masehi. Hubungan ini sudah jauh terbentuk sebelum konsep perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN dicetuskan. Hubungan dagang antara Tiongkok dengan Asia Tenggara pertama kali diperkirakan dimulai pada jaman Dinasti Shang (1766-1122 SM), dimana alat tukar pada saat itu masih menggunakan kulit kerang. Pada periode itu, Tiongkok menamakan Asia Tenggara

sebagai “Nanyang” atau Samudera Selatan. Namun, pada periode itu masih sedikit aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan Asia Tenggara. Kemudian, pada jaman Dinasti Han (206 SM-220 M), Tiongkok sudah melakukan perluasan pasar dengan membuat suatu rute perdagangan yang dinamakan sebagai jalur sutra. Melalui jalur sutra, Tiongkok dapat menjangkau wilayah timur, barat, dan selatan Asia, termasuk Asia Tenggara dengan lebih mudah. Hubungan antara Tiongkok dan Asia Tenggara kemudian mulai mengalami perkembangan sejak jaman Dinasti Song (960-1279), dimana kekaisaran Tiongkok mulai aktif melakukan hubungan dagang dengan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Aktivitas perdagangan tersebut kemudian mulai berlanjut dan semakin intens hingga abad ke-15, dimana pada saat itu, Tiongkok mengutus Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang diplomat dari Dinasti Ming untuk melakukan ekspedisi perdagangan ke berbagai wilayah di belahan dunia, salah satunya Asia Tenggara. (Stuart-Fox, 2004)

Pada abad ke-16, para penjelajah Eropa menemukan banyak pedagang Tiongkok yang tengah berlabuh di perairan Asia Tenggara. Ini membuktikan bahwa, Tiongkok memiliki hubungan komersil yang baik dengan kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-19, aktivitas perdagangan Tiongkok harus mengalami kemunduran karena harus bersaing dengan ekspansi perdagangan barat. Selain itu, hadirnya praktik kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20 sempat membuat Tiongkok kehilangan kedaulatannya. Aktivitas ekonomi Tiongkok mulai pulih pada masa pemerintahan Mao Zedong, setelah perseteruan antara Partai Komunis Tiongkok (PKC) dengan Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT) dapat diselesaikan melalui deklarasi pembentukan Republik Rakyat Tiongkok.

Meskipun demikian, Tiongkok justru menjadi negara dengan sistem ekonomi yang tertutup karena sangat anti terhadap gelombang kapitalisme barat. Namun, pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, Tiongkok melakukan transformasi secara besar-besaran, negara itu kemudian mulai mengadopsi kebijakan luar negeri yang terbuka, terutama dalam aspek ekonomi. Deng mengizinkan investor dan pengusaha asing, termasuk barat, untuk berinvestasi dan melakukan aktivitas perdagangan dengan Tiongkok. Hal tersebut membuat ekonomi Tiongkok mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga 10% per tahun. Pembangunan dibidang pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang serius bagi Deng, dimana Tiongkok secara aktif mengirimkan ratusan ribu pelajarnya untuk menempuh pendidikan di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat. Dalam aspek politik, Deng tidak lagi terpaku pada kompetisi ideologi tetapi justru ingin menjalin relasi menguntungkan dengan negara-negara lain. Deng terus meningkatkan aktivitas ekonominya, Tiongkok mulai mengintegrasikan diri ke dalam tatanan internasional dengan bergabung ke IMF, World Bank, dan GATT. (Ngeow, 2019)

Deng memperluas kapasitas ekonominya dan dalam rangka menandingi pengaruh ekonomi barat di kawasan Asia. Tiongkok kemudian memperbaharui konsep jalur sutra menjadi suatu “*grand strategy*” melalui kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) atau *Belt and Road Initiative* (BRI). Proyek ini merupakan strategi Tiongkok dalam membuka ruang bagi peluang ekonomi yang lebih besar terhadap kawasan disekitarnya. Dalam memperlancar implementasi dari BRI, Tiongkok menggunakan berbagai pendekatan. (Anam & Ristiyani, 2018)

Pertama, Beijing telah mengadopsi pendekatan sumber daya yang baik dan komprehensif untuk Asia Tenggara yang bertujuan untuk menarik sebagian besar kawasan ke dalam lingkup pengaruhnya. Strategi Tiongkok dalam mendominasi kawasan Asia Tenggara memanfaatkan setiap instrumen kekuatan nasional. Secara militer, Beijing telah meningkatkan kapasitasnya untuk memproyeksikan kekuatan ke Asia Tenggara dengan membangun pos-pos pulau buatan lebih dari 500 mil dari pantai selatannya. Tiongkok juga telah memperluas penjaga pantai dan kekuatan militer angkatan lautnya, menciptakan alat baru yang lebih fleksibel untuk menekan negara-negara Asia Tenggara sambil meminimalkan risiko bentrokan militer. Secara ekonomi, Beijing telah menawarkan bujukan kepada negara-negara di Asia Tenggara dalam bentuk liberalisasi perdagangan regional dan janji investasi melalui AIIB. Sisi sebaliknya adalah ancaman yang ada di mana-mana dan sesekali penggunaan pemaksaan ekonomi oleh Tiongkok untuk mencapai prioritasnya.

Secara diplomatis, Tiongkok telah menyebarkan perpecahan dengan cara yang lebih lunak di antara anggota organisasi multilateral utama di kawasan itu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan memberikan perlindungan politik kepada para pemimpin negara yang bersedia melancarkan agenda politik Beijing. Dengan keberhasilan yang lebih terbatas, China telah berusaha untuk mendorong aliansi AS dengan Filipina dan Thailand. Terakhir, Beijing telah memanfaatkan diplomasi publik tradisional dan alat pengaruh lainnya seperti Institut Konfusius untuk mempromosikan pandangan yang lebih baik tentang tujuan regionalnya.

Kedua, konektivitas infrastruktur telah muncul sebagai komponen kunci dari pendekatan Tiongkok ke Asia Tenggara. Kawasan itu adalah fokus utama *Belt and Road*. Melalui investasi infrastrukturnya, Tiongkok telah memperoleh pengaruh atas beberapa negara di Asia Tenggara, proyek-proyek di Malaysia, Myanmar, Kamboja, Indonesia, dan Laos, antara lain, telah menjadi sorotan karena membebani negara-negara penerima dengan utang yang tidak berkelanjutan kepada perusahaan milik negara Tiongkok. Melalui pembangunan dan pengoperasian pelabuhan-pelabuhan strategis di Asia Tenggara, Tiongkok juga berusaha untuk menempatkan jaringan fasilitas pendukung dan penambahan untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), meskipun tidak mungkin berhasil mendapatkan pangkalan bergaya Djibouti. Saat berupaya mengubah citra *Belt and Road*, Beijing telah menempatkan penekanan yang semakin besar pada konektivitas digital di Asia Tenggara dan secara global. Proyek-proyek yang melibatkan Tiongkok di kawasan ini banyak yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pusat data, jaringan keamanan publik perkotaan, hingga kabel bawah laut.

Ketiga, Tiongkok semakin membentuk tata kelola domestik di seluruh kawasan dengan cara yang bertentangan dengan demokrasi. Beijing telah mendukung para pemimpin otoriter di Asia Tenggara untuk memajukan kepentingannya. Menjelang pemilihan umum Kamboja Juli 2018, kelompok peretas Tiongkok melakukan upaya penekanan dan sabotase kepada beberapa entitas pemilu Kamboja dan kelompok politik yang mengkritik Perdana Menteri Hun Sen, salah satu pembela terkuat pengaruh Beijing di ASEAN. Prospek kerja

sama ekonomi yang lebih dekat dengan Beijing telah mengurangi kemampuan Amerika untuk menekan junta militer di Thailand dan pemerintah Rodrigo Duterte di Filipina. Di Asia Tenggara, seperti yang terjadi di tempat lain, BRI telah berfungsi sebagai saluran korupsi sehingga dana investasi dari Beijing tersebut tidak dapat terserap secara maksimal pada pembangunan dan memaksa pemerintah setempat untuk melakukan pinjaman lagi ke Tiongkok. (Kliman, 2019).

2.4 Transisi Agenda Luar Negeri India Terhadap Asia Tenggara Dari *Look East* Menjadi *Act East*

Posisi isolasi ekonomi India mulai dibongkar setelah berakhirnya Perang Dingin, terutama melalui reformasi liberalisasi tahun 1991 yang diperkenalkan oleh PM Narsimha Rao saat itu dan Menteri Keuangannya Manmohan Singh, yang akan memerintah India sebagai PM antara tahun 2004 dan 2014. Reformasi Rao berusaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang semakin besar yang mulai dihadapi India pada 1980-an karena New Delhi hampir gagal membayar utang luar negerinya pada pergantian dekade. Program liberalisasi Rao dirancang untuk menarik investasi ke India dan membuka pasar India untuk arus keuangan global dengan mengurangi tarif dan monopoli negara, sehingga menjadikan pasar konsumen India dengan lebih dari satu miliar jangkauannya sebagai target yang sangat menarik untuk investasi asing langsung.

Kebijakan *Look East* diluncurkan pada tahun 1992 oleh Perdana Menteri India PV Narsimha Rao, setahun setelah disintegrasi Uni Soviet (Uni Soviet) pada tahun 1991. Pada saat itu, India sangat bergantung pada Uni Soviet. Setelah kejatuhannya, India menghadapi krisis ekonomi. Oleh karena itu, ia beralih ke

negara-negara Asia Tenggara. India melihat ruang lingkup pertumbuhan ekonomi yang sangat luas di Asia Tenggara dan juga memperhatikan bahwa Jepang dan Tiongkok muncul sebagai entitas kunci di wilayah tersebut. Elemen penting lain dari kebijakan *Look East* adalah pengembangan kawasan bagian timur laut India. Wilayah tersebut berbagi perbatasannya dengan Myanmar dan Bangladesh, keduanya menjadi pintu gerbang ke Asia Tenggara. Kebijakan ini dilanjutkan bahkan setelah pemerintahan PV Narsimha Rao (1991-96). Itu berhasil ditegakkan oleh Atal Bihari Vajpayee (1998-2004) dan Manmohan Singh (2004-2014). Kebijakan *Look East* memiliki empat tujuan luas sejak dimulai:

- Integrasi Ekonomi Regional,
- Reformasi dan Liberalisasi
- Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- Perkembangan India Timur Laut.

Sejak awal 1990-an, India mulai fokus pada kerja sama ekonomi dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Pergeseran geografis di area fokus ini terutama disebabkan oleh keberhasilan ekonomi Asia Timur dan perkembangan pesat Asia Tenggara. Kebijakan *Look East* memiliki dua fase, yang pertama pada proses perdagangan dan investasi, dan fase kedua memperluas fokus geografis ke Australia dan Asia Timur. (Fathullah, 2017)

Keberhasilan kebijakan *Look East* mendorong pemerintah India untuk mengembangkan kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang lebih berorientasi pada tindakan, berbasis proyek dan hasil. Kebijakan tersebut kemudian dinamakan *Act East* yang diumumkan pada tahun 2014 oleh pemerintahan Perdana Menteri

Narendra Modi melalui menteri Luar Negerinya, Sushma Swaraj. Kebijakan tersebut dianggap sebagai peningkatan dari kebijakan *Look East*. Kebijakan *Act East* difokuskan pada 4C yaitu Budaya, Perdagangan, Konektivitas, dan Pembangunan Kapasitas.

Jika dilihat dari aspek geekonomi, Kebijakan *Act East* diluncurkan pada saat ekonomi India jauh lebih baik daripada kebijakan *Look East* pada tahun 1991. Kebijakan *Act East* memiliki fokus yang jauh lebih besar pada kerja sama pertahanan sedangkan ini adalah faktor yang kurang dalam kebijakan *Look East*. Kemudian, pengembangan wilayah Timur Laut India menjadi fokus utama pada kebijakan *Act East* karena wilayah tersebut dianggap sebagai pintu gerbang ke kawasan Asia Tenggara.

Jika dilihat dari aspek geopolitik, *Act East* memiliki konsep yang sangat strategis. India telah menjalin hubungan tidak hanya dengan Asia Tenggara tetapi juga dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang mendanai proyek infrastruktur ini. Selain itu, kebijakan ini relatif baik secara geopolitik untuk India. Ada fokus yang lebih besar pada Negara Dialog Keamanan Segiempat (QUAD) seperti Australia, Jepang, AS, dan India sendiri. Hubungan dan kemitraan strategis dijalin dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam untuk menguji serta mengimbangi dominasi Tiongkok. (KESAVAN, 2020)

Jika dilihat dari aspek investasi, melalui *Act East*, negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang telah melakukan berbagai investasi di India. Misalnya, Investasi Jepang di India termasuk The Bullet Train, farmasi, telekomunikasi, kota pintar, bahan kimia, dll. Jepang dan India telah melembagakan Dialog Menteri 2+2.

Jepang juga setuju untuk mendukung inisiatif India seperti Digital India, Skill India, dan Make in India. Korea Selatan di sisi lain memiliki pengaruh besar di India khususnya di sektor otomotif (Hyundai) dan juga di sektor elektronik (Samsung dan LG). Investasi asing langsung Korea Selatan ke India terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai US\$ 5,71 miliar pada akhir tahun 2018. (Annisa, 2021)

Jika dilihat dari aspek sosial budaya, melalui kebijakan *Act East*, India dapat lebih berfokus pada pertukaran budaya, agama, dan bahasa. Misalnya, hubungan peradaban dan budaya sejak beberapa ribu tahun yang lalu (dari zaman prasejarah) pedagang India membawa agama Hindu dan Budha ke wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Hindu ditemukan di Sumatera, Bali, dan Filipina. Candi Hindu Angkor Wat di Kamboja, Candi Borobudur di Jawa menjadi salah satu saksi sejarah. Jika dibandingkan dengan *Look East*, fokus dari kebijakan itu hanya terbatas pada perdagangan dan investasi. Padahal *Act East Policy* tidak hanya terfokus pada kerjasama ekonomi tetapi juga memiliki dimensi keamanan.

Jika dilihat dari dampak strategis yang dihasilkan, kebijakan *Act East* jauh lebih efektif dan komprehensif daripada kebijakan *Look East*. Ini tidak berarti bahwa kebijakan *Look East* harus diabaikan. Di balik kesuksesan dan landasan dasar dari kebijakan *Act East* dimulai dari keberhasilan kebijakan *Look East*.

2.4 Sejarah Hubungan Bilateral Tiongkok Dengan Vietnam

Hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam telah dibingkai dalam sejarah panjang sebagai sesama penghuni benua Asia. Dari semua negara di Asia Tenggara, Vietnam memiliki hubungan yang paling rumit dan beragam dengan Tiongkok.

Dalam menggambarkan hubungan antara kedua negara tersebut, diperlukan pemahaman mengenai latar belakang hubungan sosio-budaya yang sudah terjalin sejak lama. Interaksi Tiongkok dengan Vietnam sebenarnya jauh lebih kompleks daripada masalah sejarah, budaya, atau ideologi.

Interaksi antara Tiongkok dengan Vietnam sudah terjalin dengan lama, bahkan diprediksi sudah ada sejak abad ke-3 SM. Antara abad ke-1 SM dan abad ke-15 M, Vietnam tunduk pada empat periode terpisah dari dominasi kekaisaran Tiongkok meskipun berhasil merebut kemerdekaan setelah Pertempuran Bạch Đằng pada tahun 938 M. (Taylor, 1991) Setelah itu, serangkaian konflik terbuka antara Tiongkok dan Vietnam sering terjadi, Vietnam kemudian menginvasi Tiongkok, selama Perang Lý–Song pada masa dinasti Lý. Vietnam bahkan berhasil menduduki beberapa kabupaten di wilayah tersebut, yang sekarang masuk kedalam wilayah Guangxi dan Guangdong. Konflik tersebut menjadi faktor utama konflik berkelanjutan antara Tiongkok dan Vietnam.

Pada tahun 1884, selama dinasti Nguyễn Vietnam, dinasti Qing dan Prancis berperang dalam Perang Tiongkok-Prancis, yang berakhir dengan kekalahan Tiongkok. Perjanjian Tientsin mengakui dominasi Prancis di Vietnam dan Indochina, yang menandai berakhirnya pengaruh resmi Tiongkok di Vietnam dan awal periode kolonial Prancis di Vietnam. Tiongkok dan Vietnam kemudian harus menghadapi kolonialisme dan imperialisme oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II, dan Vietnam mendekam di bawah kekuasaan Vichy Prancis. Di provinsi Guangxi dan Guangdong di Tiongkok, kaum revolusioner Vietnam, dipimpin oleh Phan Bội Châu, telah mengatur aliansi dengan Nasionalis Tiongkok, Kuomintang.

Pada periode ini, hubungan antara Tiongkok dan Vietnam kemudian membaik karena memiliki beban yang sama melawan penjajahan. Bahkan praktik pernikahan campuran antara kedua pihak semakin memperkuat hubungan antara keduanya. (Chapuis, 1995)

Hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam kembali tidak harmonis setelah Perang Dunia II, dimana Jepang dan Jerman harus menerima kekalahan. Pada saat itu, Presiden AS, Franklin Roosevelt, secara pribadi memutuskan bahwa Prancis tidak boleh kembali ke Indochina setelah perang usai. Roosevelt menawarkan pemimpin Kuomintang, Chiang Kai-shek, agar seluruh Indochina berada di bawah kekuasaan Tiongkok. Pada bulan Agustus 1943, Tiongkok memutuskan hubungan diplomatik dengan Vichy Prancis sehingga hubungan diplomatik hanya akan dilakukan antara Tiongkok dan Vietnam, tanpa perantara Prancis. Namun, setelah kematian Franklin D. Roosevelt, penggantinya, Harry S. Truman, justru merubah keputusan Roosevelt dan memberikan Vietnam kemerdekaan.

Kemerdekaan Vietnam tentunya berdampak pada pengaruh komunis Tiongkok di wilayah itu. Tiongkok bersama dengan Uni Soviet kemudian berniat untuk menguasai Vietnam dengan memanfaatkan Vietnam Utara sebagai aliansi karena memiliki kedekatan secara geografis, budaya, dan ideologis. Disisi lain, Vietnam Selatan berada dipihak Prancis dan sekutunya, Amerika Serikat. Eskalasi konflik antara kedua pihak semakin memanas dan berlangsung antara tahun 1949 hingga 1975. (Addington, 2000)

Selama Perang Vietnam, Vietnam Utara dan Tiongkok telah sepakat untuk menunda menangani masalah teritorial mereka sampai Vietnam Selatan dikalahkan.

Isu-isu tersebut antara lain tidak adanya delineasi perairan teritorial Vietnam di Teluk Tonkin dan persoalan kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan. Selama tahun 1950-an, setengah dari Paracel dikendalikan oleh Tiongkok dan sisanya oleh Vietnam Selatan. Pada tahun 1958, Vietnam Utara menerima klaim China atas Paracel dan melepaskan klaimnya sendiri; satu tahun sebelumnya, Tiongkok telah menyerahkan Pulau Ekor Naga Putih ke Vietnam Utara. Potensi deposit minyak lepas pantai di Teluk Tonkin meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dan Vietnam Selatan. Pada tahun 1960, Tiongkok menjadi negara pertama yang mengakui Viet Cong di Vietnam. Pada tahun 1973, dengan berakhirnya Perang Vietnam, Vietnam Utara mengumumkan niatnya untuk mengizinkan perusahaan asing mengeksplorasi cadangan minyak di perairan yang disengketakan. Pada Januari 1974, bentrokan antara pasukan Tiongkok dan Vietnam Selatan mengakibatkan Tiongkok mengambil kendali penuh atas Paracel. Setelah Kejatuhan Saigon pada tahun 1975, Vietnam Utara mengambil alih sebagian Kepulauan Spratly yang dikuasai Vietnam Selatan. Vietnam yang bersatu kemudian membatalkan penolakan sebelumnya atas klaimnya atas Paracel, dan baik Tiongkok maupun Vietnam mengklaim kendali atas semua Spratly dan benar-benar mengendalikan beberapa pulau. Vietnam dipersatukan kembali pada tahun 1976. (Addington, 2000)

Hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam kemudian kembali mengalami ketegangan pada saat Perang Kamboja-Vietnam, dimana Tiongkok berada dipihak Kamboja. Dalam perang ini, kedua belah pihak menderita kerugian yang relatif besar, dengan ribuan korban jiwa. Pembicaraan perdamaian selanjutnya gagal pada

Desember 1979, Tiongkok dan Vietnam memulai penumpukan pasukan besar-besaran di sepanjang perbatasan. Vietnam membentengi kota dan distrik perbatasannya dengan menempatkan sebanyak 600.000 tentara. Tiongkok menempatkan 400.000 tentara di sisi perbatasannya. Pertempuran sporadis di perbatasan terjadi sepanjang tahun 1980-an, dan Tiongkok mengancam akan melancarkan serangan lain untuk memaksa Vietnam keluar dari Kamboja. (Heng, 2012)

Dengan pembubaran Uni Soviet tahun 1991 dan keluarnya Vietnam dari Kamboja pada tahun 1990, hubungan Tiongkok-Vietnam mulai membaik. Kedua negara merencanakan normalisasi hubungan mereka dalam pertemuan puncak rahasia di Chengdu pada September 1990, dan secara resmi menormalisasi hubungan pada November 1991. Sejak 1991, para pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara telah bertukar kunjungan. Pada tahun 1999, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Le Kha Phieu, mengunjungi Beijing, di mana dia bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Jiang Zemin, dan mengumumkan The 16 Word Guideline untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kemudian, sebuah *Joint Statement for Comprehensive Cooperation* diinisiasi pada tahun 2000.

Di era pasca-Perang Dingin, empat faktor menjadi ciri kepentingan utama Tiongkok di Vietnam. Pertama, Tiongkok ingin mendapatkan keuntungan dalam sengketa teritorial dengan Vietnam. Kedua, Tiongkok ingin mengatur Vietnam agar tidak berbelok ke arah Amerika Serikat maupun ke poros kekuatan lainnya. Ketiga, Tiongkok ingin mempengaruhi Vietnam untuk mengejar kebijakan pro-Tiongkok

dalam masalah Taiwan dan urusan internasional lainnya. Keempat, Tiongkok mendorong Vietnam untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap produk dan bisnis China. (Guan, 1998)

Sejak normalisasi hubungan Vietnam-Tiongkok pada akhir abad ke 20, Vietnam dengan tekun menjalankan strategi lindung nilai taruhannya terhadap Tiongkok: Di satu sisi, Vietnam telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi serta memperdalam hubungan dengan Tiongkok. Disisi lain, Vietnam berusaha untuk mendiversifikasi hubungan strategis eksternalnya dengan menjangkau kekuatan lain (yaitu, Rusia, India, dan Amerika Serikat). Vietnam tidak terlalu terpapar pengaruh Tiongkok secara berlebihan, karena negara itu tidak ingin terjebak kedalam kubangan hutang dan ketergantungan ekonomi. Beberapa konflik beruntun pada awal abad ke-21 antara Tiongkok dengan Vietnam telah menciptakan kewaspadaan antara satu sama lain, terutama mengenai sengketa perbatasan pulau dan laut.

2.5 Sejarah Hubungan Bilateral India Dengan Vietnam

India dengan Vietnam memiliki latar belakang hubungan bilateral yang relatif harmonis dan stabil jika dibandingkan dengan Tiongkok. Interaksi antara kedua wilayah ini sudah berlangsung sejak abad ke-2. Kedua negara memiliki hubungan tradisional yang dekat dan bersahabat jika dilihat dari akar sejarah dalam perjuangan bersama untuk pembebasan dari kekuasaan asing dan perjuangan nasional untuk kemerdekaan. India melalui perdana menterinya , Pandit Jawaharlal Nehru, adalah salah satu pengunjung pertama Vietnam setelah kemenangannya melawan Prancis di Dien Bien Phu pada tahun 1954. Perwakilan antara kedua

negara setelah itu, rajin untuk melakukan pertukaran kunjungan. Presiden Ho Chi Minh datang ke India pada bulan Februari 1958 dan Presiden Rajendra Prasad mengunjungi Vietnam pada tahun 1959. India pernah menjadi Ketua *International Commission for Supervision and Control* (ICSC) yang dibentuk untuk mengimplementasikan Kesepakatan Jenewa 1954 dan memfasilitasi proses perdamaian di Vietnam. India adalah salah satu negara yang berani mendukung kemerdekaan Vietnam dari Prancis, karena India melihat apa yang tanggung oleh Vietnam mirip dengan perjuangan India melawan penjajahan Inggris. India juga menentang keterlibatan Amerika di Vietnam pada tahun 1955- Perdana Menteri Nehru menekankan bahwa akan menjadi kesalahan bagi AS untuk terlibat. India menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam Utara pada 7 Januari 1972, setahun sebelum penarikan AS dari Vietnam dan tiga tahun sebelum Kejatuhan Saigon pada 1975. (Van, 2019)

India mendukung reunifikasi Vietnam dan kedua negara telah memelihara hubungan persahabatan. Vietnam adalah mitra regional yang penting di Asia Tenggara. India dan Vietnam bekerja sama erat dalam berbagai forum regional seperti ASEAN, *East Asia Summit*, *Mekong Ganga Cooperation*, dan *Asia Europe Meeting* (ASEM) selain UN dan WTO. India memberikan status “*Most Favoured Nation*” kepada Vietnam pada tahun 1975 dan kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan bilateral pada tahun 1978 dan Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi Bilateral (BIPPA) pada tanggal 8 Maret 1997. The Indo-Vietnam Joint Business Council telah bekerja untuk mempromosikan perdagangan dan investasi sejak tahun 1993. Pada tahun 2003, kedua negara mengumumkan

Joint Declaration on Comprehensive Cooperation ketika Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nông Đức Mạnh mengunjungi India dan kedua negara sedang merundingkan perjanjian perdagangan bebas. Pada tahun 2007, deklarasi bersama baru dikeluarkan selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Vietnam Nguyễn Tấn Dũng. Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–India mulai berlaku pada 1 Januari 2010. India dan Vietnam juga memperluas kerja sama di bidang teknologi informasi, pendidikan, dan kerja sama program antariksa nasional masing-masing. Jalur udara langsung dan peraturan visa yang disederhanakan telah dibuat untuk mendukung pariwisata. (S.V, 2022)

Perdagangan bilateral telah meningkat pesat sejak liberalisasi ekonomi Vietnam dan India. India merupakan mitra dagang terbesar ke-10 Vietnam, sedangkan Vietnam merupakan mitra dagang terbesar ke-15 India dan terbesar ke-4 di ASEAN setelah Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Komoditas ekspor utama dari India adalah mesin dan peralatan, makanan laut, obat-obatan, semua jenis kapas, mobil, tekstil dan aksesoris kulit, bahan pakan ternak, bahan kimia, resin plastik, produk kimia, serat dari semua jenis, baja dari semua jenis, kain dari segala jenis, logam biasa dan perhiasan & batu mulia. Barang-barang impor utama dari Vietnam adalah ponsel & aksesoris, komputer, dan perangkat keras elektronik, mesin dan peralatan, bahan kimia, karet, logam biasa, kayu dan produk kayu, serat dari semua jenis, lada, alat transportasi, produk baja, kopi, alas kaki, produk kimia dan polimer dan resin. (Pant, 2018)

India dan Vietnam sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis mereka sejalan dengan *Indo-Pacific Oceans Initiative* (IPOI) India dan Pandangan ASEAN

tentang Indo-Pasifik untuk mencapai keamanan, kemakmuran, dan pertumbuhan bersama untuk semua di kawasan ini. India dan Vietnam sama-sama anggota Kerjasama Mekong–Gangga, yang dibentuk untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan dekat antara India dan negara-negara di Asia Tenggara. Vietnam telah mendukung upaya India untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan bergabung dengan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). India dan Vietnam juga telah membangun kemitraan strategis, termasuk kerja sama ekstensif dalam mengembangkan tenaga nuklir, meningkatkan keamanan kawasan, dan memerangi terorisme, kejahatan transnasional, dan perdagangan narkoba.